



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIONISIUS YUDIANTO
2. Jabatan : PEJABAT PENGUJI/PENANDATANGAN SPM (PPSPM)
3. NHK : 92932

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.012.428.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m ² /28 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 327.868.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m ² /42 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 684.560.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	415.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
2. MOBIL, WULING ALMAZ 1500CC RS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	933.353
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.443.861.353
III. HUTANG	Rp.	228.650.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.215.211.353

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.